

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

Penulisan karya ilmiah dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan dengan tujuan penelitian, antara lain yaitu:

##### **1. Konsep Dasar Geografi**

###### **a. Pengertian Geografi**

Definisi geografi yang dikemukakan oleh Harvey (1984: 1) yaitu pengetahuan geografi berusaha untuk mencatat, menganalisis, dan menyimpan informasi tentang distribusi spasial terjadi secara alami dan campur tangan manusia. Geografi berkembang mengikuti perkembangan ilmu dengan tanpa menghilangkan ciri dari geografi itu sendiri. Pengertian geografi dijelaskan pula oleh Bintarto & Surastopo (1978: 30) yaitu mempelajari hubungan sebab akibat gejala dan peristiwa yang ada di permukaan bumi, baik kondisi fisik maupun makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, regional, proses, dan pembangunan.

Geografi menurut Suharyono dan Moch. Amien (1994:13), adalah ilmu yang mempelajari gejala dan sifat-sifat permukaan bumi, penyusunan penduduk menurut letaknya, dan menerangkan gejala dan sifat dari permukaan bumi dan penduduk yang disusun menurut letaknya. Pengertian Geografi menurut hasil Seminar dan Lokakarya Peningkatan

Kualitas Pengajaran Geografi di Semarang tahun 1988, bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelengkapan atau kewilayahan dalam konteks keruangan.

Geografi mempelajari bumi dengan seluruh isinya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan (Daldjoeni, 2014: 1). Geografi mempelajari fenomena kenampakan di permukaan bumi baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan melalui pendekatan keruangan, temporal, dan kompleks wilayah.

Pengertian geografi dari beberapa teori dapat ditarik kesimpulan bahwa, geografi adalah studi ilmu yang mempelajari fenomena alam dengan alam, maupun alam dengan manusia yang ada di permukaan bumi. Fenomena yang ada di permukaan bumi dipelajari dengan menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, kompleks wilayah dan temporal dengan maksud untuk mewujudkan keseimbangan kebutuhan hidup manusia dan alam.

#### **b. Pendekatan Geografi**

Pendekatan geografi yaitu sebuah langkah dan metodologi khusus untuk memahami karakteristik sebuah kenampakan atau fenomena geosfera, terutama pada interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.

## 1) Pendekatan Keruangan

Pendekatan keruangan merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Ruang dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang mampu dijadikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya (Hadi Sabari Yunus, 2010: 44). Sembilan tema dalam analisis keruangan yaitu:

- a) Analisis pola keruangan, yaitu untuk menganalisis pola persebaran fenomena geografis kemudian diklasifikasikan sesuai dari proses terbentuknya.
- b) Analisis struktur keruangan, yaitu upaya menganalisis ruang untuk mengungkap struktur gejala fisik, non fisik dan keduanya.
- c) Analisis proses keruangan, yaitu menganalisis secara terus menerus dalam rentetan fenomena geografis, sehingga terdapat dimensi waktu.
- d) Analisis interaksi keruangan, yaitu menganalisis proses yang saling mempengaruhi antar ruang.
- e) Analisis organisasi keruangan menekankan pada karakteristik sebaran elemen pembentuk ruang.
- f) Analisis asosiasi keruangan digunakan untuk mengetahui sebaran gejala tertentu yang berkorelasi dengan sebaran gejala yang lain.
- g) Analisis komparasi keruangan, yaitu membandingkan anatara wilayah satu dengan wilayah yang lain.
- h) Analisis kecenderungan keruangan, yaitu menganalisis arah perubahan yang terjadi.
- i) Analisis sinergisme keruangan, yaitu menganalisis nilai kegunaan dari proses kerjasama dua hal atau lebih banyak dibandingkan apabila masing-masing bekerja sendidri-sendiri.

Penelitian ini menggunakan analisis interaksi keruangan.

Konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling

mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen pendukung ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi.

## 2) Pendekatan Ekologi

Pendekatan ekologi adalah Studi mengenai interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya (Bintarto dan Surastopo, 1979: 18). Pendekatan ekologi merupakan sebuah upaya untuk mengaitkan keterlibatan manusia dengan lingkungannya (Yunus 2010: 93). Empat tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan ekologi yaitu:

- a) Analisis hubungan manusia dengan lingkungannya  
Analisis ini menekankan pada perilaku manusia dalam mengelola rasa, karsa, cipta yang dinamis dalam menyelenggarakan kehidupan di permukaan bumi.
- b) Analisis kegiatan manusia dengan lingkungannya  
Tujuan analisis ini yaitu untuk mengungkapkan keterkaitan kegiatan manusia dengan lingkungannya.
- c) Analisis kenampakan fisik alami dengan lingkungannya.  
Analisis ini memfokuskan pada kenampakan fisik alami, yaitu kinerja kenampakan fisik alami yang menjadi tekanan dengan mengacu pada kualitas dan kuantitas gejala.
- d) Analisis kenampakan fisik budaya dengan lingkungannya  
Fokus analisis ditujukan pada performa kualitas dan kuantitas kenampakan budaya.

Penelitian ini menggunakan analisis hubungan manusia dengan lingkungannya. Identifikasi pengelolaan ekowisata hutan mangrove untuk mengetahui proses pengelolaan yang telah dilaksanakan.

## 3) Pendekatan Kompleks Wilayah

Pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara dua pendekatan yaitu pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi. Analisis pendekatan kompleks wilayah didekati dengan interaksi antar

wilayah yang akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah yang lainnya yang memungkinkan terciptanya penawaran dan permintaan (Bintarto dan Surastopo, 1979: 24-25).

Yunus (2010: 115) pendekatan kompleks wilayah menekankan bahwa suatu wilayah merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sebuah komponen yang saling terkait. Hal yang akan terjadi apabila salah satu komponen hilang maka komponen yang lain ikut berubah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi dengan tema analisis hubungan manusia dengan lingkungannya. Analisis ini menempatkan hubungan antara manusia dengan alam saling ketergantungan. Fenomena yang ada di sekitar kawasan ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi selalu berkaitan dengan kondisi manusia di lingkungannya. Perkembangan ekowisata sangat dipengaruhi dari pengelolaan dari pihak masyarakat setempat.

### **c. Konsep Geografi**

Konsep yang digunakan dalam ilmu geografi menurut Suharyono & Amien (1994: 21) adalah:

- 1) Konsep lokasi, merupakan ciri khusus ilmu geografi, dan merupakan jawaban atas pertanyaan geografi yang pertama yaitu “dimana”.
- 2) Konsep jarak, berhubungan dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan, pendistribusian barang dan penumpang.

- 3) Konsep keterjangkauan, berkaitan dengan kondisi geografis ketersediaan sarana akomodasi atau komunikasi yang dapat digunakan.
- 4) Konsep pola, berhubungan dengan susunan ruang di permukaan bumi.
- 5) Konsep interaksi, yaitu kegiatan mempengaruhi daya, objek tempat satu dengan tempat yang lainnya.
- 6) Konsep deferensi areal, yaitu suatu wilayah yang mempunyai karakteristik tersendiri sebagai suatu wilayah yang berbeda dengan yang lainnya.
- 7) Konsep keterkaitan keruangan, menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep interaksi. Konsep interaksi dapat menganalisis keterkaitan antara manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Terbentuknya ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi dipengaruhi oleh faktor alam dan juga manusia.

#### **d. Prinsip Geografi**

Prinsip geografi menurut Sumaatmaja (1997: 42) meliputi:

- 1) Prinsip distribusi, persebaran gejala dan fakta geografi tidak tersebar merata antara wilayah satu dengan wilayah yang lain.
- 2) Prinsip interelasi, merupakan hubungan antara faktor fisis dengan faktor fisis, faktor manusia dengan faktor manusia, serta faktor fisis dengan faktor manusia.
- 3) Prinsip deskripsi, yaitu suatu prinsip pada geografi yang memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang dipelajari.
- 4) Prinsip korologi, merupakan gabungan dari prinsip distribusi, prinsip interelasi, dan prinsip deskripsi.

Prinsip yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari prinsip distribusi, prinsip interelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi dapat

menjelaskan secara sistematis terkait pelaksanaan pengelolaan ekowisata hutan mangro Pasar Banggi.

## **2. Ekowisata**

Ekowisata merupakan suatu jenis wisata alam, yang memiliki beberapa syarat khusus, dapat juga disebut sebagai wisata ekologis. Syarat terpenting dari ekowisata yaitu upaya menjaga daya dukung kelestarian alam dan budaya lokal yang dikunjungi dengan turut serta membantu pelestarian alam dan ekonomi masyarakat lokal (Nasution, 2018: 13). Puspita (2015: 5) mengatakan, suatu kegiatan ekowisata pada skala terbatas sesuai mutu dan perilaku terhadap pengelola maupun pengunjung. Usaha meningkatkan pemahaman pengunjung terhadap kelestarian ekologis, budaya lokal, serta masalah pembangunan.

Penyelenggaraan ekowisata dilakukan dengan metode sederhana, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan hidup (*the way of life*). Ekowisata dimaksudkan untuk menjaga lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya (Fandelli, 2000:49). Pengelolaan ekowisata tidak menuntut ketersediaan fasilitas akomodasi modern (*glamour*) yang dilengkapi dengan peralatan serba mewah atau bangunan-bangunan megah. Ekowisata diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, atau mempelajari sesuatu dari alam tentang flora-fauna, atau sosial-budaya etnis setempat dengan cara yang sesederhana mungkin (Yoeti, 2000: 15).

Prinsip ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi, “kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata, konservasi, ekonomis, edukasi, memberikan pengalaman kepada pengunjung, serta menampung kearifan lokal”. Khotimah (2008: 107), mengatakan bahwasannya seluruh kegiatan pariwisata harus memperhatikan serta mempertimbangkan keberadaan ekosistem setempat demi keberlangsungan hidup serta menjaga keseimbangan kualitas lingkungan.

Ekowisata pesisir dan laut merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan berkelanjutan, dimana pengelolaan bentang alam diarahkan pada sebuah kelestarian sumberdaya pesisir dan laut dengan menyeimbangkan pengelolaan budaya kesejahteraan masyarakat pesisir. Fernando (2009: 24) mengatakan, bahwa kegiatan konservasi diarahkan untuk menjaga pemanfaatan sumberdaya pesisir di waktu mendatang. Pendekatan lainnya yaitu ekowisata diharapkan dapat menjamin adanya keberpihakan kepada masyarakat lokal agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Pengembangan Ekowisata pesisir harus mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek tujuan wisata dan aspek tujuan pasar. Meskipun pelaksanaan ekowisata menganut konsep pengarusutamaan produk atau pasar, namun pengembangan produk wisata tetap menjamin kelestarian sumberdaya alam dan budaya masyarakat pesisir laut (Yusnikusuma, 2016: 173). Selain



pengembangan atraksi, perlu adanya perhatian terhadap produk unggulan di kawasan ekowisata, sehingga memungkinkan untuk lebih memajukan ekowisata tersebut.

Pengelolaan ekowisata pesisir dan laut harus lebih berpihak terhadap aspek pelestarian dibandingkan dengan penyelenggaraan wisata, karena di dalam ekowisata sudah mengandung aspek keberlanjutan. Tribe (2002: 98) dalam tulisannya mengatakan bahwa pelestarian sumberdaya alam dan budaya masyarakat dapat menjamin terwujudnya suatu keberlanjutan dalam pembangunan. Pengembangan ekowisata pesisir yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengembangan kawasan hutan mangrove sebagai objek wisata berbasis ekowisata, dengan tetap mengutamakan fungsinya sebagai komponen ekosistem yang mendukung kelestarian lingkungan.

### **3. Prinsip dan Kriteria Ekowisata**

Tahun 1970 mulai berdiri organisasi konservasi yaitu ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan (WWF-Indonesia, 2009: 3). Ekowisata diartikan sebagai usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Ekowisata agar tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan dimana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Berikut

prinsip-prinsip pengelolaan ekowisata yang disebutkan oleh WWF-Indonesia (2009:3) yaitu:

**a. Prinsip Konservasi Alam**

Kriteria prinsip konservasi alam dalam sebuah pengelolaan ekowisata yaitu, (1) Prinsip daya dukung lingkungan, (2) Berusaha memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, (3) Mendorong terbentuknya ”*ecotourism conservancies*”.

**b. Prinsip Ekonomi**

Kriteria prinsip ekonomi dalam sebuah pengelolaan ekowisata yaitu, (1) Ekowisata harus mampu mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan fasilitas dan amenities sesuai dengan kondisi lokasi wisata, (2) Mampu mendorong adanya prosedur sertifikasi pengelola dengan kondisi lokasi wisata, (3) Mendorong ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, (4) Ekowisata dan pengelola turut mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat.

**c. Prinsip Edukasi**

Kriteria prinsip edukasi dalam sebuah pengelolaan ekowisata yaitu, (1) Kegiatan ekowisata mendorong masyarakat agar dapat mengembangkan upaya peningkatan konservasi, (2) Kegiatan ekowisata diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi, (3) Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para wisatawan menjadi bagian dari paket ekowisata, (4) Mengembangkan skema dimana wisatawan secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata.

**d. Prinsip Wisata**

Kriteria prinsip wisata dalam sebuah pengelolaan ekowisata yaitu, (1) Kegiatan ekowisata memperhitungkan tingkat pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan, (2) Fasilitas pendukung yang dibangun tidak merusak pada ekosistem yang sangat unik dan rentan, (3) Rancangan fasilitas umum sedapat mungkin sesuai tradisi lokal, (4) Adanya sistem pengolahan sampah di sekitar fasilitas umum, (5) Kegiatan ekowisata mendukung program reboisasi, (6) Mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni dan tradisi lokal, (7) Kegiatan sehari-hari termasuk panen, menanam, mencari ikan, berburu dapat dimasukkan ke dalam atraksi lokal untuk memperkenalkan wisatawan pada cara hidup masyarakat.

#### **4. Pariwisata**

Pariwisata dan rekreasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Semakin maju tingkat kehidupan masyarakat, maka kebutuhan akan pariwisata akan semakin meningkat. Wisata yang diambil dari kata rekreasi merupakan kegiatan dari dan menuju tempat wisata. Kusmayadi (2000: 83) mengatakan bahwa, wisata adalah kegiatan perjalanan bersifat sementara yang dilakukan oleh orang-orang ke suatu tempat di luar tempat kerja dan kediamannya. Aktivitas ini dilakukan, apabila selama mereka berada di tempat tersebut mereka mendapatkan kepuasan sebagaimana yang diharapkan.

Wisata sering diartikan atau diberi padanan kata yang sama dengan rekreasi. Fandelli (2002: 36) mengatakan, rekreasi adalah kegiatan aktif atau pasif yang dilakukan dengan bebas dan kreatif dalam waktu senggang sebagai selingan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan keinginan individu. Clauson dan Kneth (1969: 47) juga mengatakan bahwa, rekreasi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan karena seorang tersebut memang menginginkannya. Kegiatan pariwisata dilihat dari segi psikologis dapat memberikan pengalaman emosional dan inspirasi bagi para peminatnya. Fernando (2009: 96) mengartikan rekreasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan waktu luang secara konstruktif dan menyenangkan. Sedangkan menurut Furqon (2010: 17) rekreasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk bersenang-senang atau bermain-main.

Definisi pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa rekreasi atau pariwisata merupakan suatu kegiatan yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan batin dan kesegaran jasmani bagi orang-orang yang melakukannya. Pariwisata dapat berlangsung di luar tempat kerja ataupun tempat kediamannya yang dilakukan dengan keinginan, dana, dan sesuai dengan kegemarannya.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari kebahagiaan, keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan hidupnya dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu pengetahuan (William, 2015: 147). Kartini (2016: 21) mengatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan kegiatan, proses, dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta tidak bermaksud mencari nafkah.

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda. Perjalanan dapat dianggap sebagai perjalanan wisata apabila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu bersifat sementara, tidak terjadi karena dipaksa, dan tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran (Gartner, 1996: 57).

Pendapat yang dikemukakan dari beberapa teori yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari daerah asal menuju daerah tujuan wisata. Tujuan seseorang melakukan wisata yaitu untuk menemukan

ketentraman atau dengan kata lain ingin menemukan suasana baru dengan rutinitas yang dilakukan sehari-hari.

## **5. Hutan *Mangrove* sebagai Zona Penyangga**

Indonesia sebagai negara maritim, memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu sekitar 99.093 km, dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km<sup>2</sup> (Badan Informasi Geospasial, 2018: 30). Kawasan pesisir yang merupakan dataran rendah pada umumnya dapat dijumpai hutan dengan vegetasi *mangrove*. Hutan *mangrove* merupakan ekosistem yang terdiri atas gabungan komponen darat dan komponen laut. Hutan mangrove di dalamnya terdapat flora dan fauna yang hidup saling bergantung satu dengan lainnya (Sawitri, 2013: 298). Bujang (1998: 284) mengatakan bahwa mangrove adalah flora yang hidup dikawasan berlumpur, berpasir dan berair. Hutan mangrove di dalamnya terdapat fauna yang hidup menempel pada akar, batang, dan juga di dalam lumpur.

Roziqin (2014: 21) menjelaskan bahwa ekosistem mangrove merupakan suatu tumbuhan peralihan antara darat dan laut. Terdapat di daerah tropis di sepanjang pantai yang terlindung dan di muara sungai yang merupakan komunitas tumbuhan pantai yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove. Tumbuhan pantai ini mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut sesuai dengan tingkat salinitas, lama penggenangan, substrat, dan morfologi pantainya. Direktorat Pesisir dan Kelautan (2012) menjelaskan bahwa, mangrove dapat di jumpai pada daerah sepanjang muara sungai, atau daerah yang banyak dipengaruhi oleh faktor aliran sungai dan

daerah yang biasanya lebih didominasi oleh air laut. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang memiliki manfaat yang sangat besar apabila ditinjau dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Tuwo (2011: 23) mengatakan bahwa ekosistem *mangrove* merupakan daerah yang menghubungkan antara ekosistem pesisir dengan daratan yang bersifat dinamis. Ekosistem *mangrove* memiliki fungsi dan peranan penting bagi penunjang sistem penyangga kehidupan. Mengingat pentingnya fungsi dan peranan hutan mangrove tersebut, maka hutan mangrove seharusnya dikelola sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya melalui upaya-upaya rehabilitasi bagi hutan *mangrove* yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan maupun yang telah mengalami kerusakan.

Pemulihan *mangrove* dirasa perlu dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kepentingan ekologis dan nilai-nilai lingkungan hutan *mangrove* telah lama terabaikan. Kedua, tingginya subsistensi ketergantungan pada sumberdaya alam hutan *mangrove*. Ketiga, kerusakan hutan *mangrove* skala besar yang terjadi di seluruh dunia mengarah ke erosi pesisir, penurunan sumberdaya perikanan dan konsekuensi lingkungan lainnya (Knight, 1997: 144). Upaya pemulihan juga dilakukan untuk pemenuhan berbagai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang dapat menjadi penunjang "sistem penyangga kehidupan" bagi daerah di sekitarnya (Kusaeri, 2015: 213). Knight (1997: 145) menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian hutan mangrove diperlukan komitmen bersama tentang pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap ekosistem mangrove. Menjaga kelestarian dapat melalui kegiatan

restorasi dan pengelolaan *mangrove*. Penelitian-penelitian yang dilakukan diharapkan tidak hanya mengkaji mengenai ekologi, struktur dan fungsi ekosistem mangrove saja, tetapi perlu sampai pada penetapan kerangka kerja pengelolaan ekosistem *mangrove*, sebagai acuan pengelolaan selanjutnya. Kusaeri (2015: 210) mengemukakan bahwa konservasi *mangrove* merupakan aspek penting dalam mengelola ekosistem pantai tropis. Kondisi hutan *mangrove* yang telah dipulihkan dapat dimanfaatkan sesuai prinsip-prinsip konservasi untuk menjamin kelestariannya.

Menurut Dahuri (2003: 47), alternatif pemanfaatan lain dari hutan mangrove yang mengarah pada tujuan konservasi hutan mangrove adalah dijadikan sebagai lahan penelitian ilmiah (*scientific research*), pendidikan (*education*), dan rekreasi terbatas atau ekowisata (*ecotourism*). Hakim (2004: 114) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan mangrove sebagai sebuah kawasan objek wisata dapat meningkatkan faktor ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi hutan mangrove, sehingga diharapkan kesejahteraan hidup mereka lebih baik.

Hasil uraian dari dinamika ekosistem *mangrove* dan upaya konservasi, dapat disimpulkan bahwa konservasi hutan *mangrove* tergantung dari jenis aktivitas manusia di daerah aliran sungai yang terdapat ekosistem *mangrove*. Pemanfaatan informasi historis yang digabungkan dengan analisis lanskap jangka panjang terhadap perubahan pemanfaatan lahan, hutan *mangrove* menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan ekowisata yang berada di dalam suatu kawasan konservasi.

Pearch (1984: 17) menyatakan bahwa suatu kawasan akan bernilai lebih dan menjadi daya tarik tersendiri jika di dalamnya terdapat suatu yang unik untuk dilihat dan dirasakan. Hal ini merupakan kunci dari suatu pengembangan kawasan wisata. Hutan *mangrove* memiliki nilai wisata melalui daya tarik flora dan fauna yang berasosiasi dalam ekosistemnya. Hal ini dikarenakan hutan mangrove merupakan habitat yang saling berhubungan, yaitu biota akuatik (perairan), semiakuatik, dan teresterial (darat).

Hutan *mangrove* berupa sekumpulan vegetasi yang unik. Satwa serta makhluk hidup lain yang ada di dalam ekosistem *mangrove* memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Raharjo (2014: 39) mengatkan bahwa ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan dalam kegiatan mempromosikan lingkungan yang khas dan terjaga keasliannya sekaligus menjadi suatu kawasan kunjungan wisata.

Pemanfaatan kawasan *mangrove* sebagai lokasi objek wisata telah dikembangkan sejak lama. Pengembangan kawasan mangrove sebagai lokasi wisata ditujukan sebagai kegiatan konservasi dan pendidikan. Prasetya (2015: 12) mengatakan bahwa, keberlangsungan suatu kegiatan wisata di kawasan tersebut harus didukung oleh atraksi alam sekitar dan sarana-prasarana yang memadai, seperti fasilitas perahu penyeberangan yang sekaligus merupakan perahu yang digunakan oleh wisatawan, serta terdapat sarana penginapan yang mudah dijangkau.



Komponen flora yang ada pada ekosistem *mangrove* biasanya tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang landai dan terlindung dari hempasan gelombang serta didukung oleh aliran sungai. Komponen hutan *mangrove* selalu dipengaruhi oleh genangan pasang-surut air laut, dan sangat dinamis apabila didukung oleh sedimentasi yang memadai (Jimenez *et al*, 1985: 173).

Hutan *mangrove* ditemukan tumbuh hampir di seluruh pantai di Indonesia yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke, namun sebagian besar terdapat di Pulau Irian, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Riau dan Pulau Sumatera. Luas hutan *mangrove* di Indonesia menurut berbagai sumber sampai saat ini masih menunjukkan angka yang berbeda. Bipran (1982: 57) luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4.251.000 hektar, Dahuri (2003: 152) mengungkapkan luasan sekitar 4.250.000 hektar dan tersebar di berbagai pulau, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Irian.

## **6. Zonasi Hutan Mangrove**

Harahap (2010: 55) mengatakan bahwa Indonesia memiliki keragaman jenis mangrove antara satu pulau dengan pulau lainnya, dari 202 jenis mangrove yang telah diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Irian Jaya, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil. Vegetasi mangrove cenderung tumbuh dalam zona-zona tertentu dan

berkaitan erat dengan tipe tanah dan keadaan pasang surut. Salah satu tipe di Indonesia menurut Irwan (2010: 137) dijelaskan bahwa:

- a. Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering ditumbuhi oleh *Avicennia spp.*
- b. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh *Rhizophora spp.* Di zona ini juga dijumpai *Bruguiera spp.* dan *Xylocapus spp.*
- c. Zona berikutnya didominasi oleh *Bruguiera spp.*
- d. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa ditumbuhi oleh *Nypa fruticans*, dan beberapa spesies palem lainnya.

## 7. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan yaitu suatu bentuk manajemen untuk menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Adisasmita (2011: 22) menyatakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsifungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Uraian dari para pendapat ahli yang telah disebutkan, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi segala kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan merupakan ciri yang ada kaitannya dengan manajemen.

## **8. Kendala dalam Pengelolaan Hutan Mangrove**

Beberapa kendala yang akan muncul dalam pengelolaan hutan mangrove, yang akan dihadapi yaitu kendala aspek teknis maupun kendala aspek kelembagaan dijelaskan oleh Harahab (2010: 72) sebagai berikut:

### **a. Kendala Aspek Teknis**

Pengelolaan hutan mangrove terdapat beberapa kendala dalam aspek teknis antara lain:

- 1) Kondisi habitat yang tak begitu ramah, yakni tanah yang anaerob dan labil dengan salinitas yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan tanah mineral, adanya pengaruh pasang surut dan sedimentasi serta abrasi pada berbagai lokasi tertentu.
- 2) Adanya pencampuran komponen ekosistem akuatik (ekosistem laut) dan ekosistem daratan, yang mengakibatkan pengelolaannya menjadi lebih kompleks.
- 3) Kawasan mangrove pada umumnya mendukung populasi penduduk yang cukup tinggi, tetapi pendidikan yang rendah.

### **b. Kendala Aspek Kelembagaan**

Pengelolaan hutan mangrove memiliki beberapa kendala aspek kelembagaan antara lain:

- 1) Tata ruang kawasan pesisir di banyak lokasi belum tersusun secara baik, bahkan ada yang belum sama sekali.
- 2) Status kepemilikan lahan dan tata batas yang tidak jelas.
- 3) Banyaknya pihak yang berkepentingan dengan kawasan dan sumber daya mangrove.
- 4) Belum jelasnya wewenang dan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terkait.
- 5) Masih lemahnya penegakan hukum dari peraturan perundangan yang sudah ada.
- 6) Masih lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi yang berkompetensi dalam pengelolaan mangrove.
- 7) Praktik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan mangrove belum banyak mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan tersebut.

## **9. Evaluasi Pengelolaan Program Pariwisata**

Evaluasi program merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan

sebelumnya. Hasil evaluasi program tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan yang akan datang. Jones (1994: 357) mengatakan bahwa, evaluasi program adalah suatu aktifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintahan. Program itu bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk rekomendasinya. Spesifikasi mengacu pada identifikasi tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi.

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan atau program. Evaluasi dapat mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan suatu program (Prima, 2017: 34). Program pembangunan atau kegiatan perlu adanya suatu evaluasi, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Sukardjo (2010: 43) menyatakan evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana suatu program kebijakan sudah dilakukan dan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan program tersebut.

Peraturan menteri pariwisata Republik Indonesia (Permenpari) Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa “evaluasi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar”. Evaluasi diperlukan untuk menjamin tersedianya umpan balik bagi perencanaan suatu pembangunan. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian analisis untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program berdasarkan indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode

analisis kesenjangan (analisis gap). Metode ini dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual (prestasi yang telah dicapai) dengan target kinerja (prestasi yang harus dicapai).

Awang (2008: 98) mengatakan bahwa untuk pelaksanaan penilaian terhadap kinerja membutuhkan prinsip, kriteria, dan indikator yang jelas. Respon, hasil, dan dampak dari program harus mampu diungkapkan secara rinci dan teratur. Munggoro (2001: 109) mengungkapkan bahwa prinsip adalah kebenaran fundamental atau hukum yang menjadi dasar atau tindakan. Prinsip dalam pengelolaan ekowisata dipandang sebagai gambaran kerangka utama dalam pengelolaan kawasan wisata keberlanjutan.

Evaluasi sangat perlu untuk menentukan bagaimana program yang sesungguhnya berjalan, untuk mengukur hasil dan menyelidiki apakah program dilaksanakan sesuai dengan apa yang di rencanakan. Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai tingkat keberhasilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Frank (2015: 42), evaluasi dianggap sebagai cara untuk menerapkan secara sistematis ide pengujian eksperimental atas pilihan kebijakan dalam lingkungan yang dapat dikontrol.

Arikunto dan Cepi (2008: 18) mengatakan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program, yaitu keterlaksanaan program. Tujuan evaluasi program dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yaitu untuk melaksanakan evaluasi

program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khususnya dilakukan untuk melakukan evaluasi program pada masing-masing komponen program.

Program evaluasi yang akan dilakukan dalam hal penelitian ini yaitu menggunakan waktu pelaksanaan evaluasi yaitu evaluasi formatif (proses) untuk melakukan evaluasi pengelolaan program ekowisata dalam upaya mewujudkan pariwisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan kawasan hutan mangrove di Pasar Banggi Kabupaten Rembang. Tujuan dilakukannya evaluasi program ekowisata ini adalah untuk mengukur apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan prinsip program ekowisata, apakah program yang sedang dilakukan sesuai prinsip ekowisata atau ada hambatan. Husama (2018: 88) mengatakan bahwa evaluasi mengenai implementasi prinsip ekowisata diharapkan bermanfaat bagi upaya pengembangan produk dan konservasi kawasan ekowisata. Hal tersebut sangat penting agar pengembangan kawasan mampu memberikan manfaat karena sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat.

Kerangka analisis dalam mengevaluasi suatu program pembangunan menurut Tribe (2016: 10) ada beberapa, namun analisis evaluasi program yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis keefektifan (*Effectiveness*). Efektivitas digunakan untuk mengukur mulai dari tahap target capaian, perencanaan operasional, tahap implementasi dan keluaran (*output*) yang berhasil membuat perubahan positif.

Wirawan (2012: 16) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya yaitu evaluasi kebijakan, evaluasi program, evaluasi proyek, material, dan evaluasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan jenis evaluasi program. Program adalah kegiatan atau aktivitas untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang terbatas. Nelson (1993: 54) mengatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis data tentang suatu program kebijakan. Evaluasi program yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis program ekowisata yang telah berjalan.

Evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang direncanakan. Arikunto (1999: 297) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan suatu program yang dilaksanakan telah terealisasi. Selanjutnya menurut Stufflebeam (1971: 98) evaluasi program adalah serangkaian upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

## **B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan**

Evaluasi pengelolaan kawasan wisata alam merupakan salah satu tema yang saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat dalam suatu fokus penelitian maupun dalam bidang promosi objek wisata di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengelolaan potensi wisata yang ada di suatu daerah kawasan wisata. Mengingat bahwa potensi wisata di Negara Indonesia sangat banyak, sehingga perlu adanya pengelolaan pariwisata agar potensi yang

ada pada suatu daerah dapat tergali dengan maksimal dan mengedepankan strategi pembangunan berkelanjutan. Saat ini sudah banyak peneliti yang mengkaji evaluasi pengelolaan hutan mangrove sebagai ekowisata, diantaranya dilakukan oleh Yusnikusuma (2016), Mustanto (2015), dan masih banyak lagi.

Yusnikusuma, et al (2016: 173) dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi pengelolaan Ekowisata di Kawasan Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara" mengatakan dalam penelitiannya terdapat permasalahan kerusakan alam yang disebabkan oleh kegiatan wisata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sebuah perangkat evaluasi pengelolaan ekowisata berbasis kriteria dan indikator. Set kriteria dan indikator yang telah dibuat kemudian digunakan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan kawasan ekowisata Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara. Penilaian pengelolaan ekowisata menggunakan metode observasi lapangan serta studi dokumen dilakukan untuk penilaian berkaitan dengan kawasan ekowisata dan metode wawancara serta pengisian kuesioner dilakukan untuk penilaian berkaitan dengan persepsi pengunjung dan masyarakat lokal dengan jumlah sampel masing-masing 100 orang. Hasil evaluasi dengan menggunakan set kriteria penelitian dan indikator berhasil mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam pengelolaan ekowisata. Perpaduan partisipasi masyarakat lokal dalam ikut serta mengelola kawasan dan potensi wisata menjadi nilai lebih kawasan ekowisata Tangkahan.

Penelitian evaluasi pengembangan kawasan wisata juga dilakukan oleh Prima (2017: 12), dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Pemerekan



Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” tertulis bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerekan pariwisata dalam mendukung perkembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pemerekan pariwisata. Fokus penelitian terdiri dari identifikasi program yang telah dilaksanakan, kendala dalam pelaksanaan program pemerekan, dan penyempurnaan program untuk dilaksanakan selanjutnya. Penentuan sumber data dilakukan secara purposiv serta menggunakan data primer dan sekunder untuk menganalisis pemerekan pariwisata. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa merek pariwisata Kepulauan Bangka Belitung harus segera diperbaiki dari awal dan mengikuti langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar dapat mewakili pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung.

Adhikari, *et all* (2010: 446) dalam penelitiannya yang berjudul ”*The Use and Management of Mangrove Ecosystems in Pakistan*” mengatakan dalam penelitiannya, terdapat permasalahan kerusakan ekosistem mangrove disebabkan oleh adanya eksploitasi perusakan mangrove oleh pihak kaya dan pihak miskin. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan metode survei ekonomi-sosiologis. Survei yang digunakan ada tiga yaitu, survei data lokasi, survei penilaian desa partisipatif, dan survei rumah tangga yang mempengaruhi kondisi hutan *mangrove*. Penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah pendapat bahwa ada pengaruh antara ekonomi dan mata pencaharian terhadap konservasi hutan mangrove. Kelompok miskin dan

kelompok kaya harus sama-sama memberikan distribusi terhadap kelestarian hutan mangrove.

Furqan et al (2010: 17) dalam penelitiannya yang berjudul “*Promoting Green Tourism for Future Sustainability*” mengatakan bahwa Pariwisata berbasis ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan berbagai fokus. Konsep Pariwisata berbasis ekowisata akan sangat menarik bagi pengelola pariwisata karena untuk meningkatkan tekanan dari pemerintah kepada proses peeningkatan kinerja lingkungan dengan mengadopsi teknik manajemen lingkungan yang efektif dan nyata. Selanjutnya, prestasi dan promosi yang diakui dunia internasional melalui penghargaan lingkungan akan menjadi alat bagi pengelola pariwisata dalam memasarkan layanan mereka. Hasil dari keterlibatan banyak pihak yang peduli dan bertanggung jawab mengajukan rekomendasi untuk produk ekowisata dalam mengatur dampak negatif pariwisata. Proses melaksanakan ekowisata juga menjelaskan pendekatan komparatif dari ekowisata di beberapa negara.

Knigh Drew et al (1997: 143) dalam jurnalnya yang berjudul “*Bali: Sustainable Development, Tourism and Coastal Management*”, mengemukakan bahwa Bali dengan pemandangan dan budayanya yang khas mampu bersaing dalam tekanan pembangunan. Tantangan yang signifikan dalam promosi kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang kuat, sekaligus meningkatkan budaya tradisional dan melindungi integritas lingkungan alam. Dimensi pembangunan berkelanjutan menjadi tujuh sumber kriteria yang dikembangkan dalam bentuk *Bali Sustainable Development Project* (BSDP),

untuk menilai peluang dan hambatan. Tulisan ini berfokus pada satu aspek, yaitu evaluasi dari proses pengembangan pariwisata di wilayah pesisir. Pariwisata dan tekanan pembangunan lainnya telah menyebabkan fragmentasi dan degradasi ekosistem pesisir, modifikasi proses erosi, pengendapan dan regenerasi pantai. Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya pesisir, terutama bagi masyarakat lokal dibandingkan dengan kegiatan tradisional mereka.

Knigh Drew menyarankan untuk menggunakan pendekatan terpadu dalam hal melindungi dan merehabilitasi ekosistem pesisir dalam konteks kebijakan pariwisata budaya. Pengembangan yang dilakukan antara lain menggabungkan pengelolaan pesisir dan pariwisata dengan memulai studi kelayakan untuk menilai manfaat pembuatan taman pesisir, serta komponen berbasis lahan yang berfokus pada kegiatan tradisional berkaitan dengan pertanian lahan kering, penangkapan ikan dan panen rumput laut. Masyarakat lokal juga dilibatkan dalam program interpretasi, pembangunan infrastruktur, pemantauan serta penegakan peraturan lingkungan hidup. Hal tersebut dianggap sebuah inisiatif yang dapat membantu dalam mengembangkan tindakan konservasi untuk bagian lain di Bali, bahkan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Husamah dan Atok Miftachul Huda (2018) juga mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi implementasi prinsip ekowisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan *Clungup Mangrove Conservation* Subermanjing Wetan, Malang” dengan tujuan yaitu untuk menganalisis implementasi prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten pengelolaan CMC. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah

data primer, diperoleh melalui observasi lapangan untuk melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan teknik deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum prinsip ekowisata berbasis masyarakat telah diterapkan dalam pengelolaan CMC meskipun ada beberapa kriteria untuk setiap prinsip belum ada diimplementasikan, sedang direncanakan, dikejar, dan dioptimalkan.

Nasution R. Hendrik, Ricky Avenzora, dan Tutut Sunarminto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Ekowisata di Indonesia” dengan tujuan yaitu untuk menganalisis postur rantai, konten substansial dan rentang waktu undang-undang dalam kebijakan ekowisata di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Berdasarkan hasil penelitian pada dokumen legislasi termasuk (Hukum, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri) ditemukan bahwa antara peraturan wajib dan peraturan pelaksanaan tidak ditetapkan dalam suatu periode sekitar 2 tahun sesuai. Oleh karena itu, perlu integrasi para pemangku kepentingan untuk merevisi berbagai undang-undang dan kebijakan ekowisata di Indonesia secara komprehensif, sistematis dan obyektif sehingga dinamika implementasinya dapat mengoptimalkan tujuh pilar ekowisata pengembangan.

Schaduw, Joshian N.W (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada Daerah Perlindungan Laut di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan” mengatakan bahwa ekosistem mangrove di desa Blongko memiliki banyak

wilayah pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan potensi dan kondisi ekosistem mangrove yang ada serta memberikan arahan kebijakan strategis untuk konservasi ekosistem mangrove di kawasan ini. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan oleh berbagai literatur dan institusi terkait. Hasil penelitian ini didapatkan tiga strategi kebijakan untuk menjalankan ekosistem mangrove berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan dan kelanjutan ekosistem mangrove, dan penguatan rendah dan kelembagaan. strategi ini diharapkan dapat menekan degradasi ekosistem mangrove.

Baral, Nabil (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluation and Resilience of Ecotourism in the Annapurna Conservation Area, Nepal” mengatakan bahwa ekowisata telah dipromosikan untuk mencapai tujuan yang pengembangan pariwisata dan konservasi alam. Penelitian dilakukan selama lebih dari 10 bulan penelitian lapangan, observasi, survei dan konten semi-terstruktur, serta dilakukan analisis 21 laporan tahunan. Program ekowisata dievaluasi dengan mengatur program *Annapurna Conservation Area (ACA)* dan kegiatan di bawah empat tema utama, yaitu pembangunan kapasitas lokal, pengelolaan limbah, pembangunan pendidikan, dan infrastruktur. Empat kegiatan konservasi yang dilakukan, dengan tema yang paling menonjol adalah pembangunan kapasitas lokal. Ekowisata berhasil bertahan, terutama karena pengorganisasian dari pengusaha pariwisata setempat. Pengusaha pariwisata lokal memfasilitasi pengaturan diri melalui pengembangan kapasitas dan diversifikasi mata pencaharian.

Odum (2018) juga melakukan penelitian yang berjudul “Evaluation of Potential Ecotourism Attractions for Sustainable Tourism Development in Anambra State, Nigeria” dengan tujuan mengevaluasi potensi ekowisata Negara Anambra untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu Metode kualitatif diterapkan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus. Wawancara mendalam dilakukan di seluruh delapan komunitas mulai dari Maret hingga September 2015. Empat wawancara dilakukan di setiap komunitas yaitu, pendeta, penjaga gua, petugas zona hutan, Remaja karangtaruna, Kepala Daerah, Direktur pariwisata di Kementerian Informasi, Budaya dan Pariwisata dan Direktur Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian ini yaitu ada kekosongan dalam pengembangan studi pariwisata di Nigeria tepatnya Anambra State. Penelitian yang dilakukan dapat mengisi celah di dunia akademik dengan pengetahuan tentang ekowisata di Negara Bagian Anambra, khususnya, penggunaan kuantitatif dari sumber daya ekowisata berbeda komunitas. Hasil profil pengunjung yang mengunjungi ekowisata akan digunakan dalam mengelola dan mengembangkan atraksi ekowisata serupa. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber daya ekowisata berlimpah di Anambra tetapi belum ada pengembangan yang sesuai.

Hasil uraian dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pengelolaan pariwisata umumnya menggunakan pendekatan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, dengan hasil yang diinginkan yaitu berupaya

penyempurnaan pengelolaan program ataupun proses menemukan produk unggulan untuk menarik minat wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan kajian penelitian adalah menemukan pembaruan dengan cara melengkapi kekurangan dari penelitian terdahulu. Hasil analisis penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi yaitu dalam hal fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada evaluasi prinsip ekowisata yang telah diterapkan. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan metode tri angulasi. Metode tri angulasi mempermudah peneliti untuk mampu menguatkan analisis yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Pendekatan yang akan dilakukan yaitu menggunakan pendekatan lingkungan yang biasa disebut ekowisata, dimana proses wisata yang mengedepankan keberlangsungan objek wisata yang akan dikunjungi. Faktor pembeda dengan penelitian sebelumnya juga tidak terlepas dari lokasi penelitian serta waktu penelitian.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir disusun untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka pikir dibuat untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian terkait evaluasi pengelolaan kawasan hutan *mangrove* dalam program ekowisata di Kabupaten Rembang. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai panduan serta memberikan arah terhadap penelitian ini sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik.

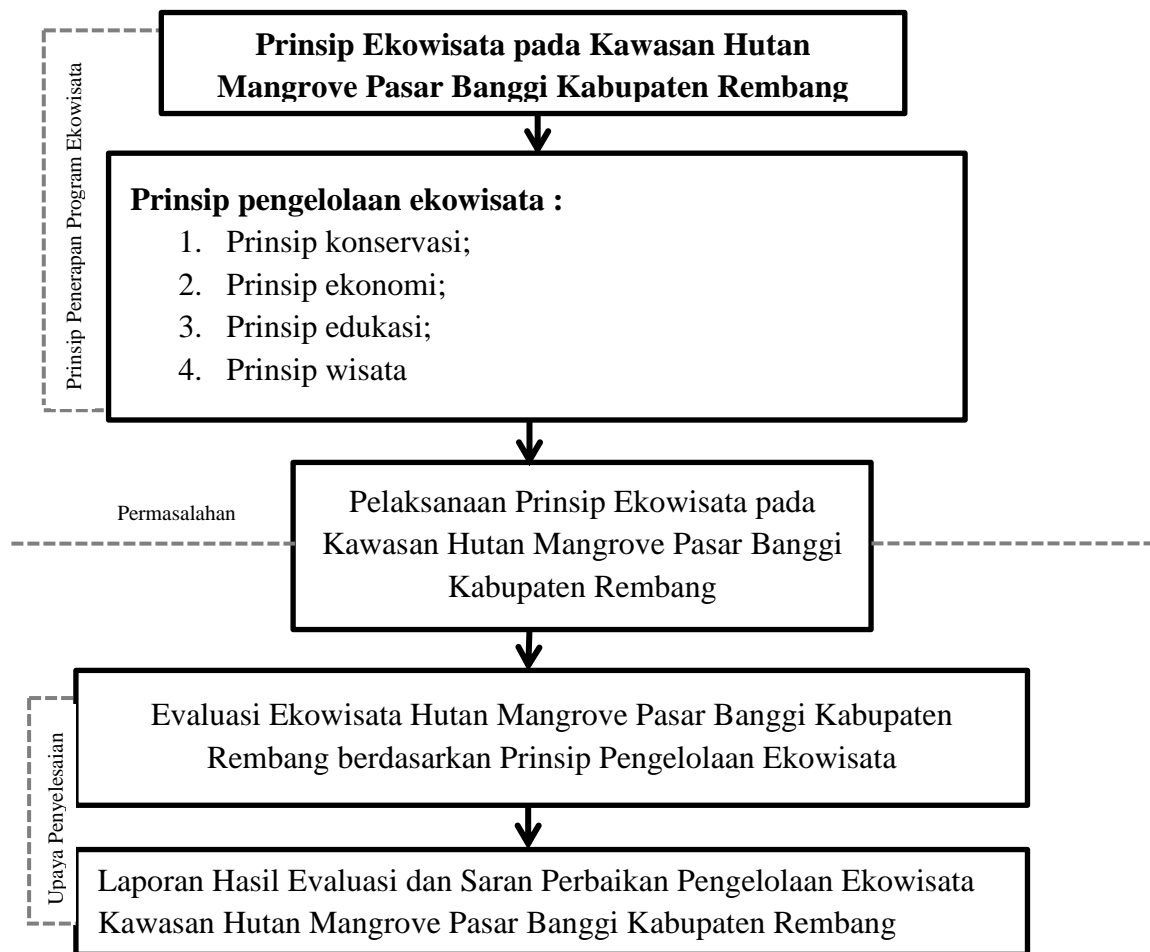
Permasalahan yang terdapat pada kawasan hutan mangrove yaitu diduga adanya ketidaksesuaian antara prinsi-prinsip dari program ekowisata yang sedang dikembangkan dengan kenyataan yang terjadi. Program ekowisata yang sedang dijalankan perlu dilakukan sebuah evaluasi, untuk menjaga eksistensi keberlanjutan program tersebut, sehingga dapat terwujud ekowisata yang sesungguhnya dan dapat dinikmati baik pengunjung maupun masyarakat sekitar.

Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip penglolaann ekowisata yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Pasal 3. Prinsip pengelolaan ekowisata yang disebutkan meliputi, konservasi, ekonomi, edukasi, dan wisata.

Prinsip ekowisata yang sudah diterapkan kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan variabel dan indikator yang ada. Hasil yang diharapkan dalam proses evaluasi ini yaitu informasi pelaksanaan program ekowisata pada kawasan hutan mangrove serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove. Output dari kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu, diharapkan terciptanya solusi penyempurnaan program ekowisata yang telah dilakukan, sehingga program dapat terlaksanan sesuai prinsip ekowisata yang telah ditetapkan.

Penulis berusaha untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini, maka kerangka pikir peneliti tampilkan berupa bagan kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar 1.





Gambar 1. Kerangka Pikir

#### D. Pertanyaan Evaluasi

Berdasarkan latar belakang serta kajian pustaka yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman hasil pengelolaan kawasan hutan mangrove dalam program ekowisata di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana upaya yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan hutan *mangrove* dalam program ekowisata di Kabupaten Rembang?